

Studi Etnografi tentang Pandangan Politik Kaum Muda Kristen Toraja terhadap Isu Agama dalam Pemilihan Presiden Indonesia

Chika Angelica Lestari

Departemen Antropologi, Universitas Hasanuddin

Correspondence author: chikaangelica7@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Religion, identity politics, political preferences, Christian youth, presidential election

How to cite:

Lestari, C. A. (2025). "Studi Etnografi tentang Pandangan Politik Kaum Muda Kristen Toraja terhadap Isu Agama dalam Pemilihan Presiden Indonesia."

ABSTRACT

Studies of religion and electoral preferences in Indonesia largely focus on Muslim-majority urban settings. This study examines how Christian youth in Tana Toraja, a Christian-majority area known for interreligious tolerance, interpret religious issues in presidential elections and determine their political choices. Using a qualitative ethnographic approach, the research involved 17 purposively selected informants aged 17–40. Data were collected through in-depth interviews conducted face-to-face and via WhatsApp video calls, supported by electoral data from the Tana Toraja General Elections Commission (KPU). The findings show that informants prioritize candidates' character and track record, vision and mission, work experience, and economic policies rather than religious identity. They oppose the use of religion as an instrument for obtaining political support. Their responses are shaped by Christian teachings, especially the principle of love, and are generally reflective, peaceful, and non-confrontational. Voting decisions are largely independent of family and social pressure. Political parties exert limited influence, while social media is the principal source of political information. The study concludes that rational evaluation, religious ethics, and digital information shape the political preferences of Christian youth in Toraja more strongly than identity-based religious mobilization.

1. Pendahuluan

Pemilu, sebagai manifestasi demokrasi, menjadi arena di mana berbagai kepentingan, termasuk yang berbasis agama, bertemu dan kadang bertentangan. Menjelang pemilu, politik identitas menjadi sebuah term yang tidak terelakkan hadir, karena semua orang atau kelompok memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan identitas melalui jalur politiknya masing-masing (Yunus et al., 2023). Adanya politik identitas menjadi modal dan kekuatan untuk memenangkan kontestasi politik (pasangan calon pemimpin tertentu), hal ini dibuktikan dengan terpilihnya pasangan Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, karena didukung dengan adanya kekuatan Islam politik maupun politik Islam (Parinduri & Pujiati, 2023). Semakin menguatnya politik identitas di Indonesia ditandai saat munculnya isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Dari

tuntunan penegakan hukum terhadap Ahok, melebar menjadi ladang politik praktis untuk menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang haramnya kepemimpinan non-muslim dalam Islam yang wacananya digulirkan dalam aksi tersebut (Kurniawan, 2018). Meskipun isu kepemimpinan non-Muslim lebih terlihat di daerah mayoritas muslim seperti Jakarta, tidak dapat dipungkiri dengan semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, menjadikan isu ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Toraja.

Toraja adalah salah satu daerah di Indonesia yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo' (Koyong, 2016). Masyarakat Toraja, meskipun mayoritas Kristen, telah lama menjalin hubungan yang damai dengan kelompok muslim dan pemeluk kepercayaan tradisional. Masyarakat Toraja memiliki rasa toleransi yang tinggi sehingga tidak pernah terdengar konflik antar umat padahal ada dua penganut agama yaitu Islam dan Kristen (Ryan Aulia & Syakirah Abu Nawas, 2021). Fenomena isu kepemimpinan non-Muslim itu menarik untuk dibahas dari sudut pandang kaum muda Kristen di Toraja, karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi Kristen, sementara juga terpapar oleh perkembangan politik dan teknologi informasi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan isu-isu sosial.

Dalam konteks kepemimpinan nasional yaitu dalam pemilihan presiden, kaum Kristen tidak memiliki pilihan selain memilih pemimpin dari kalangan muslim. Meskipun demikian, tidak pernah ada gerakan untuk tidak memilih baik berupa ajakan golput maupun boikot terhadap Pemilu dari kaum Kristen. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka tidak terpaku pada identitas agama sebagai satu-satunya faktor penentu. Fenomena ini menantang asumsi umum tentang politik identitas yang kerap kali dianggap dominan, dan membuka ruang untuk memahami lebih dalam mengapa kaum muda Kristen di Toraja tidak selalu terpaku pada identitas agama dalam menentukan pilihan politik mereka, meskipun isu kepemimpinan non-muslim mengemuka dalam konteks politik nasional. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor lain, seperti pengaruh partai politik, dinamika sosial lokal, dan perkembangan teknologi, yang berperan dalam membentuk preferensi politik mereka. Untuk memahami konteks ini secara lebih mendalam, penting untuk merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara agama dan politik, serta dinamika identitas dalam pemilu.

Salah satu penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Manese (2021) dengan judul "Relasi Agama Dan Politik: Preferensi Politik Pemilih Millennial Di Ponosakan Belang, Dalam Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2020" menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Pilkada 2020 di Sulawesi Utara terdapat salah satu calon yang beragama Islam dan ini menjadi

preferensi bagi pemilih millennial di Ponosakan Belang untuk memilih kandidat tersebut. Pembacaan menggunakan teori sosiologis, preferensi memilih pemimpin Islam karena keyakinan dan agama yang sama. Secara psikologis, hadirnya preferensi politik pemilih millennial disebabkan adanya isu yang menggunakan simbol-simbol Islam. Tesis penulis adalah dalam demokrasi electoral hubungan agama dan negara sulit dipisahkan, agama menjadi pertimbangan penting dalam politik.

Penelitian oleh Lestari (2019), dengan judul “Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia” menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini menunjukkan Politik identitas berhasil digunakan sebagai alat untuk menarik simpati Pemilih kepada salah satu calon yang memiliki latar belakang identitas yang sama. Keberhasilan ini dapat mengakibatkan elit politik yang memiliki kandidat pasangan calon dengan latar belakang identitas tertentu dari mayoritas pemilih di suatu daerah memutuskan untuk menggunakan politik identitas untuk menarik simpati Pemilih dengan identitas yang sama.

Penelitian oleh Simanjuntak & Fernandes (2022), dengan judul “Perilaku Pemilih Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif di Kota Padang” dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Kampung Pondok adalah pemilih kritis tradisional dan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat etnis Tionghoa tersebut yaitu, 1) faktor latar belakang etnis, dimana latar kesamaan latar belakang etnis menjadi faktor utama masyarakat etnis Tionghoa dalam memilih. 2) faktor kedekatan hubungan emosional pemilih dengan caleg 3) faktor agama (4) faktor partai politik (5) faktor organisasi kemasyarakatan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa agama memiliki pengaruh signifikan dalam politik dan pemilu di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang terkait dengan politik identitas dan agama dalam pemilu menekankan pada kelompok mayoritas Muslim di Indonesia ataupun agama lain, terutama di wilayah Jawa dan kota-kota besar. Sementara pandangan politik dari kaum muda Kristen di daerah mayoritas Kristen seperti Toraja masih kurang diperhatikan. Selain itu, meskipun beberapa penelitian membahas politik identitas dan agama, namun secara antropologis, alasan utama mengapa kaum muda Kristen di Toraja memilih pemimpin Muslim dalam pemilu belum sepenuhnya dijelaskan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan dan metode etnografi, mengungkap faktor-faktor budaya, agama, dan politik lokal yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pandangan kaum muda Kristen berkenaan dengan isu agama dalam proses pemilu presiden?, kemudian apa saja reaksi yang kaum muda Kristen Toraja dalam menanggapi isu agama dalam proses kampanye pemilihan presiden?,

serta apa saja pertimbangan kaum muda Kristen dalam memilih pemimpin negara?.

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis mencoba melihat dan memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan fokus pada pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Etnografi. Ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi ini adalah sifatnya yang menyeluruh dan terpadu (holistic-integratif), deskripsi yang kaya (thick description) dan analisa kualitatif dalam rangka mendapatkan cara pandang pemilik kebudayaan (native's point of view) (Siddiq & Salama, 2019).

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Tana Toraja terkenal dengan budaya yang kaya dan tradisi yang unik, terutama dalam konteks keagamaan. Selain itu, Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten di Toraja yang menjadi wilayah dengan jumlah DPT terbanyak pada saat pemilu 2024 dengan jumlah 196.548 DPT. Hal ini membuat Kabupaten Tana Toraja menjadi kantong suara Kristen terbesar di Sulawesi Selatan yang sangat penting pada saat pemilihan gubernur dan kepala negara. Waktu penelitian dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2025 hingga bulan Februari 2025 dengan alasan pada waktu ini penulis dapat bertemu dengan bebas dengan kaum muda Kristen di Toraja karena adanya masa libur. Selain itu, waktu ini dipilih agar tidak mengganggu aktivitas akademik dan penulis lebih berfokus pada penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (penentuan secara sengaja), berjumlah 17 orang dengan kriteria generasi muda berusia 17 hingga 40 tahun. Selain itu, kriteria spesifik yang lainnya adalah generasi muda yang tinggal atau berasal dari Toraja, beragama kristen, dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pemilihan umur ini berdasarkan penuturan dari anggota KPU, Betty Epsilon Idroos yang mengatakan bahwa kalau usia muda 17-40 tahun (Triono, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua metode, yaitu tatap muka langsung dan video call melalui WhatsApp. Wawancara melalui video call dilakukan untuk beberapa informan yang berada di luar kota dan sulit dijangkau secara langsung. Penulis melakukan wawancara jarak jauh ini karena ingin mendengar perspektif kaum muda Kristen yang sedang kuliah di luar Toraja, di mana mereka mungkin lebih banyak terpapar dengan berbagai isu agama dan politik dibandingkan mereka yang tinggal di Toraja. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang dirancang agar pembahasan terstruktur dan tidak keluar dari fokus penelitian. Wawancara direkam setelah mendapatkan persetujuan dari

informan dan dicatat untuk dianalisis lebih lanjut. Selain wawancara, penulis juga melakukan pengambilan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja untuk mendapatkan data pemilu 2024 di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, bentuk analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis data menurut Creswell yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif, seperti menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri, mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, melakukan koding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah disusun (Erma Ariyani et al., 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja

Toraja dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota yang disebut Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota yang di sebut Rantepao. Penelitian ini dikhususkan di Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja terletak 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km² persegi. Tana Toraja dikenal dengan pegunungannya yang tinggi, dengan sebagian besar wilayahnya terletak di daerah dataran tinggi. Berdasarkan pengamatan di lapangan di Kota Makale, Kabupaten Tana Toraja, terdapat juga beragam suku dan penggunaan bahasa. Namun, secara mayoritas penduduk Kota Makale adalah Suku Toraja. Suku Toraja mendominasi wilayah ini, dengan penggunaan bahasa Toraja sebagai bahasa utama dalam interaksi sehari-hari. Selain bahasa Toraja, masyarakat juga fasih berbahasa Indonesia, terutama dalam konteks formal dan interaksi dengan pendatang.

Kabupaten Tana Toraja terdiri atas 19 kecamatan yang terbagi dalam 47 Kelurahan dan 112 desa/lembang. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Bittuang, Bonggakaradeng, Gandangbatu Sillanan, Kurra, Makale, Makale Selatan, Makale Utara, Malimbong Balepe, Mappak, Masanda, Mengkendek, Rano, Rantetayo, Rembon, Saluputti, Sangalla, Sangalla Selatan, Sangalla Utara, dan Simbuang. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang di kutip dari (Fadhlurrahman, 2024), jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada tahun 2024 mencapai 258,26 ribu jiwa. Data ini juga merinci jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan jenjang pendidikan per Juni 2024.

PENDIDIKAN	JUMLAH JIWA	PERSentase
S3	21 Jiwa	0,008%
S2	535 Jiwa	0,21%
S1	14,84 Ribu Jiwa	5,75%

PENDIDIKAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
D3	3.617 Jiwa	1,4%
D1 dan D2	640 Jiwa	0,25%
SMA	65,75 Ribu Jiwa	25,46%
SMP	37,22 Ribu Jiwa	14,41%
SD	46,04 Ribu Jiwa	17,83%
Tidak/Belum Sekolah	58,72 Ribu Jiwa	22,74%

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut usia, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari (Darmawan, 2024), jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan kelompok umur per Juni 2024 menunjukkan variasi yang signifikan diantaranya :

UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
0,4 Tahun	14,07 Ribu Jiwa	5,45 %
5-9 Tahun	20,66 Ribu Jiwa	8 %
10-14 Tahun	24,26 Ribu Jiwa	9,39%
15-19 Tahun	27,16 Ribu Jiwa	10,52%
20-24 Tahun	24,73 Ribu Jiwa	9,58%
25-29 Tahun	19,48 Ribu Jiwa	7,54%
30-34 Tahun	16,04 Ribu Jiwa	6,21%
35-39 Tahun	16,25 Ribu Jiwa	6,29%
40-44 Tahun	16,12 Ribu Jiwa	6,24%
45-49 Tahun	16,57 Ribu Jiwa	6,42%
50-54 Tahun	15,75 Ribu Jiwa	6,1%
55-59 Tahun	12,82 Ribu Jiwa	4,96%
60-64 Tahun	9,48 Ribu Jiwa	3,67%
65-69 Tahun	7,76 Ribu Jiwa	3,01%
70-74 Tahun	6,72 Ribu Jiwa	2,6%
Lebih Dari 75 Tahun	10,39 Ribu Jiwa	4,03%

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Dan yang terakhir jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada semester 1 tahun 2024, mayoritas penduduk Kabupaten Tana Toraja menganut agama Kristen, dengan persentase mencapai 86,25%. Dari jumlah tersebut, 70,66% adalah penganut agama Protestan, sementara 15,59% lainnya adalah penganut agama Katolik. Sebagian penduduk lainnya menganut agama Islam, sebanyak 12,09%, diikuti

dengan agama Hindu sebanyak 1,56%, agama Buddha sebanyak 0,09%, dan penganut kepercayaan sebanyak 0,01%.

Pemilu di Tana Toraja

Dengan merujuk pada data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembahasan ini akan menjelaskan partisipasi pemilih muda, hasil pemilihan presiden tahun 2024, perolehan suara partai politik, serta elemen demografis yang berpengaruh pada dinamika pemilihan di Tana Toraja. Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, jumlah TPS yang tersebar di 19 Kecamatan mencapai total 547 TPS. Kecamatan yang memiliki jumlah TPS yang terbanyak adalah kecamatan Makale sebanyak 68 TPS. Selanjutnya berdasarkan data yang di terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), total pemilih (DPT Reguler) yang terdaftar dalam pemilihan umum 2024 sebanyak 196.548 orang. Pemilih ini jika dikategorikan berdasarkan Jenis Kelamin maka 100.450 pemilih di Tana Toraja berjenis kelamin laki-laki dan 96.098 pemilih berjenis kelamin perempuan. Pada Kecamatan Makale sebagai ibu kota Tana Toraja jumlah pemilih mencapai 27.228 orang, dimana pemilih dengan rentang usia 21-30 tahun dominan, sehingga mampu mencapai 6.082 orang. Selain itu, Kabupaten Tana Toraja juga memiliki pemilih dari kalangan penyandang disabilitas yang berjumlah 1.484 orang, atau sekitar 0,007550% dari total pemilih. Pemilih disabilitas ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 581 orang dengan disabilitas fisik, 112 orang dengan disabilitas intelektual, 274 orang dengan disabilitas mental, 248 orang dengan disabilitas sensorik wicara, serta 259 orang dengan disabilitas sensorik netra. Sementara itu, tidak terdapat pemilih yang terdaftar dalam kategori disabilitas sensorik rungu. Data pemilih yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan variasi jumlah pemilih di setiap kecamatan, yang dapat memberikan gambaran mengenai pola preferensi politik dan dinamika sosial masyarakat di wilayah ini.

Preferensi Politik di Tana Toraja

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih di Tana Toraja terbagi ke dalam lima kategori generasi, yaitu Pre-Boomer, Baby Boomer, Generasi X, Milenial, dan Generasi Z. Menurut (Silitonga & Tampomuri, 2024) generasi Pre-Boomer adalah mereka yang lahir dalam rentang waktu tahun 1901-1945, kemudian generasi Baby Boomer adalah mereka yang lahir rentang waktu tahun 1946-1964, selanjutnya Generasi X, mereka yang lahir antara tahun 1965 sampai 1980, ada juga generasi Milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996, dan yang terakhir yaitu generasi Z adalah insan yang lahir di rentang waktu tahun 1997-2012 yang memiliki pengaruh kuat dalam komunitasnya karena terpaan banyak informasi dari internet. Berdasarkan data KPU, distribusi pemilih di Tana Toraja berdasarkan generasi adalah sebagai berikut:

GENERASI	JUMLAH	PERSENTASE
----------	--------	------------

GENERASI	JUMLAH	PERSentase
Pre-Boomer	9.600 Orang	3,5%
Baby Boomer	32.680 Orang	16,6%
Generasi X	53.020 Orang	27,0%
Generasi Milenial	57.570 Orang	29,3%
Generasi Z	46.378 Orang	23,6%

Tabel 3. Pemilih Berdasarkan Generasi

Jumlah penduduk muda dan pemilih muda di Tana Toraja menjadi fokus penting dalam memahami dinamika pemilu, mengingat generasi muda memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Sebagai bagian dari kelompok usia produktif, pemilih muda tidak hanya berperan dalam menentukan pilihan politik, tetapi juga dalam membentuk arah masa depan daerah dan negara. Jika merujuk pada bagian pengklasifikasian informan pada metode penelitian yang mengatakan bahwa kaum muda yaitu mereka yang berumur 17-40 tahun, maka dalam data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan mereka yang tergolong dalam usia 17-40 tahun di Kabupaten Tana Toraja mencapai 107.196 orang. Total pemilih ini dibagi menjadi 3 klasifikasi usia yaitu 17-20 tahun sebanyak 24.676 orang, 21-30 tahun sebanyak 46.614 orang, dan 31-40 tahun sebanyak 35.906 orang.

Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara setiap pasangan calon mencerminkan dinamika politik di daerah ini serta kecenderungan pilihan politik pemilih di berbagai generasi dan kelompok sosial. Berdasarkan data dari KPU, hasil pemilihan presiden di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa pasangan H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., memperoleh 6.654 suara. Sementara itu, pasangan Letjen (Purn.) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 104.047 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., memperoleh 32.204 suara. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh dukungan suara terbesar di Kabupaten Tana Toraja, mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Perbedaan jumlah suara yang signifikan antara masing-masing pasangan mencerminkan preferensi politik masyarakat Tana Toraja dalam pemilihan presiden, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dalam sistem demokrasi, jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik menjadi faktor utama dalam menentukan representasi mereka di lembaga legislatif. Perolehan suara ini tidak hanya mencerminkan dukungan masyarakat terhadap partai tertentu, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi kursi dalam parlemen serta arah kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, analisis terhadap jumlah suara partai menjadi hal yang penting dalam memahami dinamika politik yang terjadi dalam suatu pemilu.

Berikut adalah deskripsi mengenai perolehan suara partai politik di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemilu legislatif yang berlangsung di Tana Toraja, berbagai partai politik memperoleh suara dengan jumlah yang bervariasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak dengan 1.603 suara, diikuti oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang meraih 1.259 suara dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 1.219 suara. Sementara itu, Partai NasDem memperoleh 666 suara, disusul oleh Partai Demokrat dengan 884 suara dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 549 suara. Beberapa partai lain yang juga memperoleh suara cukup signifikan antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan 279 suara, Partai Perindo 231 suara, Partai Gelora Indonesia 192 suara, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah suara yang sama, yaitu 192 suara. Di sisi lain, ada partai-partai yang memperoleh suara dalam jumlah lebih kecil, seperti, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 156 suara, Partai Buruh 130 suara, Partai Garda Republik Indonesia 90 suara, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 83 suara. Partai dengan perolehan suara paling sedikit adalah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Ummat yang masing-masing memperoleh 39 suara, Partai Bulan Bintang 26 suara, dan yang terakhir yaitu Partai Kebangkitan Nusantara 21 suara.

Dari data ini, terlihat bahwa partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar masih menjadi pilihan utama pemilih di Tana Toraja. Sementara itu, partai-partai kecil seperti Partai Ummat, PPP, dan Partai Kebangkitan Nusantara mendapatkan suara dalam jumlah yang lebih terbatas. Hasil ini mencerminkan dinamika politik di daerah Tana Toraja, di mana partai dengan basis massa yang lebih kuat dan jaringan yang luas cenderung memperoleh suara lebih banyak dibandingkan partai yang baru berkembang atau memiliki pengaruh yang lebih kecil.

Pandangan Kaum Muda Kristen Berkenaan dengan Isu Agama dalam Proses Pemilu Presiden

Meskipun mayoritas penduduknya beragama Kristen, masyarakat Toraja dikenal dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain, termasuk Islam, Hindu, dan kepercayaan lokal. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan kekeluargaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara keberagaman agama dan kehidupan sosial di daerah ini. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kak Nori yang mengatakan bahwa:

"Toraja kan dikenal sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Kristen, nah sebagai daerah dengan keragaman, hmm masyarakat ee di Toraja dikenal mi to daerah dengan toleransi, tinggi toleransinya antar umat beragama." (Kak Nori, 2025)

Dalam konteks Pemilu 2024, kaum muda Kristen di Tana Toraja, menjadi salah satu kelompok pemilih yang dominan, dengan keterlibatan aktif dalam menentukan arah politik nasional. Sebagai daerah yang terus berkembang,

Tana Toraja memiliki dinamika politik yang unik. Isu agama di Tana Toraja tidak menonjol seperti di beberapa daerah lain, namun tetap menjadi bagian dari perbincangan di kalangan tertentu, terutama saat Pemilu. Sebagian besar kaum muda Kristen di daerah ini menyatakan bahwa tidak ada perdebatan mengenai agama dalam pemilihan presiden. Berdasarkan wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa tidak ada isu agama yang signifikan di Toraja, karena masyarakat setempat memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan tidak menjadikan agama sebagai faktor utama dalam pemilihan pemimpin.

"Selama ini saya tidak ee khususnya di daerah Tana Toraja itu tidak ada yang mempermasalahkan itu setiap ada pemilihan kepala daerah ee pemilihan presiden itu tidak pernah ada yang mempermasalahkan agamanya, agama apa." (Kak Yorin, 2025)

"Terkait kalau masalah isu agama kalau di Toraja itu isu agama itu tidak muncul karena kita di Tana Toraja itu tingkat toleransi umat beragama itu sangat ee dijaga sehingga masalah-masalah isu agama di Tana Toraja itu tidak muncul." (Kak Stephen, 2025)

Kaum muda di daerah ini tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan toleransi dan keberagaman, sehingga keterlibatan mereka dalam politik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor rasional dibandingkan pertimbangan agama. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, kaum muda Kristen di Toraja menyadari bahwa isu agama masih digunakan dalam politik nasional, meskipun isu ini tidak secara langsung berdampak pada pemilih di daerah mereka. Berikut beberapa isu agama yang mereka ketahui selama Pilpres :

"Jadi masa-masa politik kemarin sempat terdengar bahkan ada segelintir orang yang membawa-bawa tentang isu agama dalam pemilihan presiden, ada yang bilang kalau Prabowo ini dan si ini dari keluarganya dari latar belakang Kristen to, kalo si ini dia Islam atau agama lain." (Kak Yobel, 2025)

"Ada memang yang mengisukan bahwa yang ini dominan ke yang mayoritas yang ini dominan ke minoritas, maka mereka mengharapakan bahwa mari kita mendukung yang memberikan dukungan untuk yang mayoritas." (Kak Sakti, 2025)

"Pas pemilihan presiden kemarin itu ee untuk isu-isu yang saya dapat itu lebih ke ee kepada pihak salah satu paslon yang ee apaya yang kaya kental sekali ee politik agamanya, jadi salah satu paslon itu ee dia tipikal yang apa ee radikal sekali. Ee kandidat yang Anies ya kemarin" (Kak Ricky, 2025)

"Jadi kemarin itu ee yang salah satu paslon ku lihat mengangkat ki isu agama di kampanyenya, itu paslon nomor 1, Anies, itu sampai dia ee bikin saya nda tahu bagaimana ee apa yang entah apa yang dia bikinlah waktu itu karena dak terlalu tahu ka juga tentang yang agama di sebelah to. Tapi ee dia kayak anuki kayak memang dia sampai apa itu kemarin di bawa-bawa ee agama muslim lah kaya begitu, untuk kampanyenya." (Feli, 2025)

"Mungkin kalau sepengetahuanku yang di 2024 kemarin itu yang dibawa sebenarnya dari kejadian 2017 pas Pilkada Jakarta, dimana salah satu calon pilgub saat itu mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden di 2024, Anies. Nah makanya dimana 2017 erat dikaitkan sama isu penjualan agama atau agama di politisasi, itu naik lagi di 2024." (Otniel, 2025)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan salah satu isu yang berkembang adalah narasi mengenai latar belakang agama kandidat, di mana beberapa pihak mengaitkan agama seorang calon presiden dengan potensi dukungan dari kelompok tertentu, sebagaimana disebutkan oleh Kak Yobel bahwa ada yang membahas latar belakang agama Prabowo dan kandidat lainnya sebagai bagian dari strategi politik. Selain itu, Kak Sakti menegaskan bahwa ada kelompok yang berusaha mengarahkan pemilih untuk mendukung kandidat berdasarkan kedekatan agamanya dengan mayoritas penduduk, menunjukkan bahwa politik identitas masih menjadi alat mobilisasi suara di beberapa daerah. Kak Ricky dan Feli juga menyoroti bahwa dalam Pilpres 2024, salah satu pasangan calon dinilai menggunakan pendekatan politik berbasis agama secara kuat, yang menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pemilih terkait kemungkinan kebijakan yang berpihak pada kelompok agama tertentu. Sementara itu, Otniel mengaitkan fenomena ini dengan peristiwa Pilkada Jakarta 2017, di mana politik agama digunakan untuk menjatuhkan lawan, dan strategi serupa kembali muncul dalam Pilpres 2024.

Di antara berbagai isu agama yang muncul dalam Pilpres, salah satu isu agama yang paling banyak diperbincangkan oleh kaum muda Kristen di Toraja adalah kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Bagi sebagian besar informan, isu Ahok adalah satu-satunya isu agama yang paling mereka kenal dalam konteks politik nasional. Kak Rian, misalnya, menyatakan bahwa berita tentang Ahok adalah satu-satunya isu agama yang pernah ia dengar dalam politik. Hal ini terbukti dalam kutipan wawancara dengan Kak Rian yang mengatakan bahwa :

“Kalau masalah isu agama yang saya hadapi, yang saya dengar beritanya itu tentang Ahok yang menista agama dalam pemilihan DKI Jakarta cuma itu saja.” (Kak Rian, 2025)

Selain itu, perspektif serupa juga disampaikan oleh Otniel, yang melihat bahwa kasus Ahok bukan hanya sekadar peristiwa politik biasa, tetapi telah menjadi fenomena nasional yang paling dikenal oleh masyarakat luas, termasuk kaum muda Kristen di Toraja. Menurut Otniel, alasan utama mengapa kaum muda Kristen di Toraja hanya mengetahui isu ini dibandingkan isu agama lain dalam Pilpres adalah karena kasus Ahok adalah satu-satunya kasus yang benar-benar mendapat perhatian besar di tingkat nasional. Isu ini bukan hanya diperbincangkan dalam lingkup Jakarta, tetapi menjadi peristiwa politik yang diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar daerah tersebut. “Karena satu-satunya yang memang ada dan di tahu semua orang adalah itu.” (Otniel, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi kaum muda Kristen di Toraja, isu Ahok menjadi begitu dominan karena memiliki dampak luas dan terus dibahas dalam berbagai diskusi politik nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kaum muda Kristen di Toraja tidak secara langsung mengalami dampak dari politik identitas berbasis agama, mereka tetap merasa terhubung dengan peristiwa politik nasional yang terjadi di luar daerah mereka. Keterikatan ini

menunjukkan bagaimana identitas politik tidak hanya dibentuk oleh pengalaman langsung, tetapi juga oleh narasi yang berkembang dalam komunitas yang lebih luas.

Mengingat bagaimana politik identitas berbasis agama terus digunakan dalam berbagai kontestasi politik, kaum muda Kristen di Toraja memiliki pandangan tersendiri mengenai apakah fenomena ini adalah sesuatu yang wajar dalam dinamika politik Indonesia atau justru menunjukkan adanya problematika yang lebih dalam, dalam sistem politik nasional. Bagi sebagian kaum muda Kristen di Toraja, mereka memiliki pandangan yang menarik terkait isu agama. Mereka melihat munculnya isu agama dalam kontestasi politik, seperti Pilpres, sebagai sesuatu yang “wajar”. Pandangan ini bukan berarti mereka sepenuhnya menyetujui atau menormalisasi politisasi agama, melainkan lebih kepada pengakuan terhadap realitas politik yang ada. Mereka melihat bahwa dalam negara demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk dalam membahas aspek keagamaan dalam politik. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mengangkat isu agama dalam kampanye, hal itu dianggap sebagai bagian dari hak mereka untuk berpendapat. Hal ini tercermin dalam kutipan wawancara bersama Kak Yorin yang berpendapat bahwa:

"Kalau ada yang berpendapat seperti itu ya boleh dikatakan wajar saja karena orang itu punya hak masing-masing. Kalau orang itu mengatakan berpendapat seperti itu ya itulah pendapat dia, jadi itu juga bilang tidak boleh, ee tidak bisa bilang tidak boleh karena ya orang itu punya hak untuk bisa berpendapat." (Kak Yorin, 2025)

"Sebenarnya itu hal wajar dalam sebuah politik toh, karena kita di Indonesia kan negara majemuk, ada banyak agama toh. Jadi mungkin dari maksud tim-tim atau yang memberikan isu tentang agama itu, bukan maksudnya negatif, hanya memperkenalkan si ini, calon ini, agama ini. Jadi saya kira ndada ji maksud negatifnya." (Kak Yobel, 2025)

Dari pendapat Kak Yobel juga dapat dikatakan bahwa konteks masyarakat Indonesia yang majemuk juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pandangan mereka. Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya, tentu memiliki dinamika politik yang kompleks. Isu agama, sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dihindari dalam perbincangan politik. Meskipun sebagian kaum muda Kristen di Toraja menganggap bahwa isu agama dalam Pilpres merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, ada juga yang berpandangan sebaliknya. Bagi mereka, kemunculan isu agama dalam politik bukanlah hal yang wajar, melainkan sebuah permasalahan serius yang dapat merusak esensi demokrasi dan menciptakan ketimpangan sosial. Bagi kaum muda Kristen di Toraja, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Mereka percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini sejalan dengan

yang dikatakan oleh Kak Stephen yang pada saat wawancara yang mengatakan bahwa :

"Menurut saya terkait dengan ee kandidat yang memunculkan isu SARA terkait Pilpres yang baru-baru ini, saya kira itu isu yang tidak wajar karena ee ideologi ini kan terkait dengan Pancasila, itu bertentangan dengan hal tersebut." (Kak Stephen, 2025)

Oleh karena itu, penggunaan isu agama dalam kampanye atau kontestasi politik dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Salah satu faktor yang membuat politisasi agama terus terjadi dalam kontestasi politik adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, kaum muda Kristen di Toraja, termasuk Otniel, melihat bahwa fenomena ini erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan suatu negara dan bagaimana masyarakatnya menjadikan agama sebagai harapan dalam kehidupan mereka. Otniel dalam wawancara mengatakan bahwa :

"Orang yang miskin cenderung religius karena itu sebagai harapan, makanya ketika negara kita dalam kondisi yang miskin, untuk orang-orang dalam kontestasi politik akan mudah menggunakan itu, makanya hal itu menjadi sering dan sebenarnya tidak wajar untuk dilakukan, tidak etislah harusnya." (Otniel, 2025)

Dari kutipan wawancara di atas, Otniel menjelaskan bahwa masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit cenderung lebih religius. Agama, dalam hal ini, menjadi sumber harapan dan keyakinan di tengah ketidakpastian hidup. Ketika negara berada dalam kondisi "miskin" dalam arti luas, baik secara material maupun sosial, masyarakat akan mencari pegangan dan kekuatan dalam agama. Kondisi ini, menurut Otniel, menciptakan celah bagi para politisi untuk memanfaatkan sentimen agama sebagai alat meraih dukungan. Di sisi lain, tidak semua kaum muda Kristen di Toraja menganggap bahwa penggunaan isu agama dalam Pilpres adalah sesuatu yang sepenuhnya salah atau benar. Beberapa di antara mereka justru mengambil posisi netral, dengan menilai bahwa isu agama dalam politik tergantung pada bagaimana dan dalam konteks apa ia digunakan. Hal ini sejalan dengan kutipan wawancara oleh Kak Ricky, yang menyatakan bahwa :

"Menurut ku kalau ee salah satu paslon menggunakan agama ee sebenarnya tidak wajar, kecuali kalau batasannya dalam penggunaan moral, moral agama seperti kayak korupsi atau something ee itu kan untuk masyarakat. Itu sebenarnya tidak masalah atau wajar. Tapi kalau lebih ke arah ee pilih saya karena saya beragama begini-begini dan saya akan begini-begini, itu yang sebenarnya saya rasa, itu tidak wajar." (Kak Ricky, 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa isu agama dalam politik tidak selalu dipandang dalam sudut pandang benar dan salah, tetapi dapat memiliki interpretasi yang lebih fleksibel tergantung pada bagaimana agama itu digunakan dalam proses politik. Ia berpendapat bahwa agama dapat berperan positif dalam politik jika digunakan untuk menegakkan nilai-nilai moral universal, seperti kejujuran, keadilan, dan anti-korupsi. Dalam konteks ini, agama menjadi pegangan yang membimbing para pemimpin dalam menjalankan tugas mereka untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan

demikian, meskipun agama masih menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia, kaum muda Kristen di Toraja lebih menitikberatkan pada aspek lain dalam menilai seorang pemimpin, terlebih dalam konteks kepemimpinan nasional.

Dalam menentukan aspek ideal kepemimpinan nasional, kaum muda Kristen di Toraja memiliki beragam perspektif yang tidak hanya berfokus pada identitas kandidat, tetapi juga pada nilai-nilai kepemimpinan yang mereka anggap penting untuk kemajuan bangsa. Mayoritas informan menekankan bahwa latar belakang identitas seperti suku, agama, dan daerah asal seharusnya tidak menjadi faktor penentu dalam melihat calon pemimpin dalam kepemimpinan nasional. Pandangan ini tercermin dalam wawancara dengan beberapa informan yang menegaskan bahwa yang paling penting dalam memilih pemimpin bukanlah identitasnya, melainkan kemampuan dan kinerja yang jelas dalam membangun negara. Otniel, misalnya, menyatakan bahwa :

“Kalo menurut saya aspek ideal itu bukan melihat dari latar belakang identitasnya atau suku, agamanya, lebih ditekankan bagaimana pendidikan dan track rekornya di dalam dunia pemerintahan. Karna kalo kita cuma melihat dari suku dan agama itu terlalu dangkal untuk negara demokrasi, makanya kita memiliki pemimpin yang begitu-begitu saja karna kita lebih mementingkan suku dan agama. Harusnya suku dan agama ini tidak perlu dipermasalahkan dalam masalah ini, makanya aspek ideal menurut saya orang yang terdidik dan orang yang punya track rekor yang jelas. Tidak ada masalah (SARA) yang penting dia orangnya pintar, orangnya bertanggung jawab dan punya track rekor.” (Otniel, 2025)

Dari pandangan di atas dapat dilihat bahwa kaum muda Kristen di Toraja menilai bahwa seorang pemimpin ideal adalah seseorang yang memiliki pendidikan yang baik, pengalaman dalam pemerintahan, serta rekam jejak yang jelas dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mencerminkan kesadaran politik yang lebih rasional dan modern, di mana keputusan dalam memilih pemimpin tidak lagi berbasis pada sentimen kelompok, tetapi pada kapabilitas individu. Di tengah kesadaran akan realitas politik nasional ini, muncul pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana mereka menyikapi seruan yang melarang memilih pemimpin dari agama tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan dari awal penelitian ini bahwa, salah satu peristiwa yang menegaskan bagaimana agama dijadikan alat politik dalam kontestasi pemilu adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Fenomena ini kemudian melahirkan seruan untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim, yang menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun seruan ini tidak berdampak langsung terhadap pemilih di Toraja, kaum muda Kristen di Toraja dengan tingkat toleransi beragama yang tinggi, tetap mengikuti perkembangan isu ini dan memiliki pandangan tersendiri terhadap seruan seperti itu. Dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa kaum muda Kristen di Toraja memiliki sikap yang kritis dan rasional dalam menyikapi seruan larangan memilih pemimpin

berdasarkan agama. Mereka tidak hanya menolak gagasan ini, tetapi juga memahami bahwa seruan tersebut lebih merupakan suatu gagasan yang tidak muncul secara alami dari masyarakat, melainkan merupakan bagian dari strategi politik kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan sentimen keagamaan untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini, kaum muda Kristen di Toraja menyadari bahwa agama telah menjadi alat yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membangun kekuatan politik, sebagaimana disampaikan oleh Kak Rinin:

“Jelas itu menentang undang-undang, melanggar undang-undang, peraturan. Apalagi kalau sudah menjurus ke salah satu apa, salah satu agama ya boleh dibilang ya SARA. Tapi pendapat begitu kan hanya sebagian kelompok dari mereka sebenarnya. Banyak juga yang tidak suka cara-cara begitu, buktinya kan banyak juga yang mendukung Ahok walaupun mereka Islam. (Kak Rinin, 2025)”

Kesadaran kaum muda Kristen di Toraja terhadap strategi politik berbasis agama menunjukkan bahwa mereka tidak mudah terjebak dalam politik identitas yang mengutamakan perbedaan agama sebagai faktor utama dalam memilih pemimpin. Mereka memahami bahwa politik identitas tidak hanya berkaitan dengan kepentingan domestik, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan kelompok mayoritas, hingga faktor partai politik tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaum muda Kristen di Toraja tidak terpengaruh oleh seruan larangan memilih pemimpin berdasarkan agama.

Isu agama dalam politik tidak hanya membentuk persepsi publik terhadap calon pemimpin, tetapi juga berpotensi membawa dampak bagi kelompok-kelompok tertentu, termasuk kaum muda Kristen di Toraja. Dari hasil wawancara dengan para informan, tampak bahwa pandangan kaum muda Kristen di Toraja mengenai dampak isu agama dalam Pilpres cukup beragam. Sebagian besar informan menganggap bahwa isu agama merugikan, terutama bagi kelompok minoritas seperti Kristen. Hal ini tampak dalam wawancara bersama dengan Kak Parlan yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sangat merugikan kita, karena dari segi demokrasi kita sudah sangat dirugikan padahal kalau dari segi kemampuan kita juga dapat bersaing dengan mereka sebenarnya, apalagi kalau dari segi-segi kerja samanya dengan daerah di luar-luar negeri, ya kemungkinan kita bisa di terima dengan baik, itu sebenarnya sudah sangat merugikan bagi kita yang minoritas ini.” (Kak Parlan, 2025)”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa salah satu dampak dari isu agama yang merugikan kaum minoritas adalah menghambat prinsip demokrasi dan mengurangi kesempatan kaum minoritas untuk diakui serta berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Dengan demikian, dampak dari isu agama dalam Pilpres tidak dapat digeneralisasi, tetapi harus dipahami dalam konteks pengalaman dan sudut pandang masing-masing individu serta dinamika sosial-politik yang melingkupinya.

Reaksi Kaum Muda Kristen terhadap Isu-Isu Agama dalam Pemilihan Presiden

Setelah memahami bagaimana kaum muda Kristen di Toraja memandang isu agama dalam Pilpres, penting untuk melihat bagaimana mereka merespons fenomena ini. Sikap dan pandangan politik seseorang tidak hanya tercermin dalam pemikiran mereka, tetapi juga dalam tindakan yang mereka pilih, baik dalam bentuk keterlibatan aktif maupun sikap pasif terhadap suatu isu. Meskipun mereka menyadari bahwa politik identitas berbasis agama masih digunakan dalam politik nasional dan mungkin menyadari bahwa isu agama ada yang merugikan bagi mereka, mereka tidak meresponsnya dengan aksi-aksi besar seperti demonstrasi atau protes terbuka. Salah satu respons yang paling banyak dilakukan oleh kaum muda Kristen di Toraja adalah berdiskusi dalam lingkup kecil, baik dalam lingkungan gereja, komunitas pemuda, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Diskusi ini menjadi sarana mereka untuk memahami isu yang berkembang serta mempertajam sikap politik mereka secara rasional. Hal ini tercermin dari salah satu kutipan wawancara informan yaitu Kak Stephen yang mengatakan bahwa :

“Terkait masalah itu jadi reaksi yang kami lakukan sebenarnya belum ada, cuma ee sharing-sharing saja yang dilaksanakan di kalangan anak muda untuk menanggapi itu.” (Kak Stephen, 2025)

Mereka menggunakan ruang diskusi untuk memahami berbagai perspektif tanpa harus mengekspresikan sikap mereka dalam aksi terbuka. Namun, bukan berarti mereka diam saja akan tetapi, meskipun tidak melakukan aksi protes langsung, sebagian kaum muda Kristen di Toraja juga aktif menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai isu agama dalam Pilpres. Melalui media sosial, mereka bisa meluruskan informasi yang berkembang dan membagikan pandangan mereka terkait politik identitas berbasis agama. Kak Ricky, misalnya, dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Kalau untuk hal yang dilakukan sebenarnya saya tidak demo ya karena menurutku ee sekarang itu ada hal-hal yang bisa dilakukan selain demo contohnya petisi. Kemarin itu kayaknya tidak ada petisi yang masuk atau saya juga tidak lihat, tapi di sosial media kita menanggapi hal-hal itu. Jadi kita kalo ada something yang seperti itu ya kita luruskan, kita sampaikan dengan baik, melalui media sosial.” (Kak Ricky, 2025)

Dalam konteks kaum muda Kristen di Toraja, mereka memilih untuk berpartisipasi secara online karena lebih aman, praktis, dan tetap memberikan dampak bagi diskusi politik. Dengan aktif berpartisipasi di media sosial, kaum muda Kristen di Toraja berusaha untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan memberikan sudut pandang yang lebih rasional terhadap isu politik identitas berbasis agama. Selain mendiskusikan dalam lingkup internal dan menggunakan media sosial, sebagian informan juga merespons isu agama dalam Pilpres dengan memilih menggunakan Pendekatan Spiritual dimana bagi mereka berdoa adalah sebagai bentuk respons politik mereka. Beberapa

informan memilih untuk berdoa dan menyerahkan keputusan politik kepada Tuhan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari kutipan wawancara bersama dengan Kak Anti dimana Ia mengatakan bahwa :

"Diam dan kita mendoakan mereka. Supaya eee tidak terulang kembali dan eh sadar begitu. Jadi diam berdoa dan beribadah supaya jalan keluarnya bisa mendapatkan yang terbaik ." (Kak Anti)

Mereka percaya bahwa doa adalah cara terbaik untuk menghadapi politik identitas berbasis agama tanpa harus terlibat dalam konflik. Keputusan mereka untuk menghindari aksi protes terbuka dan memilih jalur seperti doa, diskusi internal, serta penggunaan media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang membuat mereka memilih reaksi atau respons seperti itu karena faktor status minoritas mereka sebagai umat Kristen di Indonesia. Dalam konteks ini posisi minoritas tidak hanya berdampak pada jumlah populasi, tetapi juga pada dinamika sosial-politik yang mereka hadapi. Selain itu berdasarkan wawancara, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi mereka adalah budaya Toraja yang mengutamakan harmoni sosial. Daripada melakukan demonstrasi, kaum muda Kristen di Toraja lebih memilih jalur yang mereka anggap lebih realistis dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Selanjutnya, faktor internal yang paling banyak diungkapkan oleh beberapa informan adalah adanya sikap spiritual, dimana mereka mengedepankan mengenai nilai-nilai keagamaan yang mereka anut, terutama ajaran tentang kasih. Banyak informan menegaskan bahwa dasar pengajaran dalam agama Kristen adalah kasih. Hal ini tercermin dalam salah satu kutipan wawancara bersama informan yaitu, Kak Sakti yang mengatakan bahwa:

"Sebagaimana yang diajarkan di agama kita itu bahwa kasihilah semua orang, mengasihi semua orang seperti diri sendiri, apalagi ada juga bagian di kitab suci kita itu bahwa kasihilah musuhmu. Ya walaupun orang memusuhi kita atau mungkin tidak memberikan kita tempat mungkin, ee kesempatan yang diberikan itu sangat sempit, tetapi kita tetap mengasihi mereka." (Kak Sakti, 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana sistem kepercayaan Kristen membentuk cara individu memahami konflik dan merespons ketidakadilan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip kasih tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun harmoni sosial, terutama dalam menghadapi perbedaan politik dan ideologi di era demokrasi. Dengan demikian, ajaran kasih dalam kekristenan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral individu, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memengaruhi perilaku dalam kehidupan politik dan demokrasi. Dalam konteks pemilihan pemimpin, misalnya, kaum muda Kristen di Toraja tetap berpegang pada nilai-nilai kasih dan keadilan dengan tidak menjadikan perbedaan agama sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik mereka. Prinsip ini memungkinkan mereka untuk tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengorbankan keyakinan moral yang mereka pegang teguh.

Pertimbangan Kaum Muda Kristen dalam Memilih Pemimpin Negara

Bagi kaum muda Kristen di Toraja, keputusan politik yang mereka ambil dalam pemilihan presiden menjadi cerminan dari nilai-nilai yang mereka anut, termasuk sejauh mana agama, visi-misi calon, pengalaman kerja, dan peran partai politik berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka. Berdasarkan hasil data wawancara yang dilakukan bersama informan, sebagian besar informan memilih pasangan kandidat nomor 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini sejalan dengan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja dimana mayoritas masyarakat di Tana Toraja memilih kandidat nomor 02 dengan jumlah 104.047 suara. Dalam hal ini, kutipan wawancara tidak akan dipaparkan guna menghormati hak privasi informan serta menjunjung prinsip Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam pemilihan. Namun, jika dihitung dari total informan yang berjumlah 17 orang, 11 dari informan memilih kandidat 02, Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka. Setelah itu 2 informan memilih kandidat 01 yaitu Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar, kemudian 1 informan memilih kandidat 03 yaitu Ganjar Pranowo & Mahfud MD, dan yang terakhir 3 informan menolak untuk menyebutkan pilihan politiknya. Dengan dominasi pilihan terhadap pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka di kalangan informan, bukan tidak mungkin mereka tidak memiliki alasan dalam memilih kandidat tersebut. Salah satu faktor utama yang mendasari pilihan mereka adalah mereka melihat bagaimana karakter dari sosok Prabowo itu sendiri. Salah satu informan menjelaskan bagaimana karakter Prabowo dalam pemilihan presiden kemarin.

"Dimana saya melihat sosok presiden itu melihat dari karakternya. Nah untuk Prabowo sendiri itu karakternya memang orang yang memang konsisten, karena terbukti dari beberapa kali mi mencalon dan tidak pernah menyerah untuk mencalonkan diri terus. Yang kedua dia tegas orangnya dan Prabowo juga orang yang toleran ilah makanya saya pilih Prabowo, ya memang istilahnya kalau misalnya apa namanya kalau mengeluarkan suatu speech atau pidatonya itu tidak terlalu kayak ee merujuk kepada SARA ji makanya kek ku bilang dia lebih toleran ilah." (Informan, 2025)

Hal ini dapat dilihat menggunakan teori kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik, menurut Max Weber (1947), adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin memiliki daya tarik atau kharisma yang luar biasa, yang memungkinkan mereka mendapatkan loyalitas dan dukungan kuat dari pengikutnya (Warata, 2024). Dalam konteks ini, Prabowo Subianto dapat dikaji sebagai sosok pemimpin karismatik yang menarik pemilih melalui citranya sebagai tokoh tegas, nasionalis, dan berwibawa. Hal ini terlihat jelas dari rekam jejak panjangnya dalam dunia militer dan pemerintahan yang juga sempat disinggung oleh beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menegaskan bahwa keputusan mereka dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden berasal dari diri mereka sendiri, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Mereka menekankan bahwa pilihan yang

diambil merupakan hasil dari pertimbangan pribadi, baik yang didasarkan pada hati nurani, penilaian rasional terhadap visi-misi dan rekam jejak kandidat, maupun kesan yang diperoleh dari debat dan kampanye politik. salah satu kutipan wawancara bersama informan yang menyatakan sikap bahwa hal tersebut berasal dari diri sendiri dapat dilihat dari wawancara bersama Kak Sakti yang mengatakan bahwa : “Saya secara pribadi tidak ada pengaruh apapun, dari hati saya sendiri.” (Kak Sakti, 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa preferensi politik mereka lebih bersifat individual dan reflektif, dibandingkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap tekanan sosial atau budaya di lingkungan mereka salah satunya adalah agama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor agama bukanlah pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik mereka. Sebagian besar informan secara eksplisit menyatakan bahwa latar belakang agama calon tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mereka dalam pemilihan presiden. Hal ini tercermin dalam kutipan wawancara bersama dengan Kak Ricky yang mengatakan bahwa :

“Kalau kemarin tidak jadi pertimbangan karena memang kan agamanya sama semua ya, walaupun berbeda tidak jadi pertimbangan juga sebenarnya. karena ya memang agama bukan jadi tolak ukur saya dalam hal memilih. Itu faktor uhh keseratus, yang paling adalah yang pertama bagaimana orangnya.” (Kak Ricky, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih mempertimbangkan aspek lain dibandingkan mempertimbangkan latar belakang agama calon kandidat. Hal ini terjadi karena semua kandidat dalam pemilu kali ini berasal dari latar belakang agama yang sama, maka faktor agama menjadi semakin tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, dalam konteks pemilu secara umum, mereka menyatakan bahwa jika pun ada calon dari latar belakang agama yang berbeda, hal tersebut tidak akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa beberapa kaum muda Kristen di Toraja lebih menitikberatkan perhatian mereka pada isu-isu yang berdampak langsung pada isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara bersama dengan informan yang mengatakan bahwa :

“Ya mudah-mudahan ada perubahan tentang ee ekonomi. Perubahan tentang terutama tentang korupsi di negara kita supaya bisa betul-betul dihapuskan di negara kita ini itu saja sih sebenarnya” (Kak Parlan, 2025)

“Ketika memiliki banyak pengetahuan kemampuan bahkan kecerdasan dan kepintaran maka dalam memimpin bangsa dan negara sudah pasti eh akan lebih mudah dan ketika menghadapi banyak masalah, terutama ya kita kan Indonesia banyak utang, pasti dia akan punya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut” (Kak Anti, 2025)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kaum muda Kristen di Toraja juga menaruh perhatian besar pada permasalahan ekonomi seperti utang negara dan korupsi karena mereka melihat dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Utang negara yang terus meningkat serta

korupsi juga menjadi isu sentral, karena mereka menyadari bahwa korupsi menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, mereka juga lebih mengutamakan faktor rasional seperti kompetensi, pengalaman, serta visi yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Berdasarkan hasil analisis data yang di dapatkan pada saat wawancara, mayoritas informan lebih memilih melihat bagaimana visi misi serta pengalaman kerja calon kandidat presiden. Mereka melihat visi dan misi dari kandidat presiden karena mereka beranggapan bahwa visi dan misi dari kandidat presiden merupakan landasan utama dalam menentukan arah kepemimpinan negara selama masa jabatan. Mereka menilai bahwa visi dan misi yang jelas serta realistis dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana calon pemimpin akan mengelola pemerintahan, merancang kebijakan, dan menghadapi tantangan nasional. Hal ini tercermin dalam kutipan wawancara bersama Doni yang mengatakan bahwa :

“Karena yang paling mempengaruhi seorang pemimpin itu adalah visi misinya sih. Maksudnya yang paling mempengaruhi kita terhadap hubungan ta dengan pemimpin adalah visi misinya ji yang bisa menghubungkan kita dengan mereka begitu ee.” (Doni, 2025)

Selain itu, pengalaman kerja juga menjadi faktor penting bagi kaum muda Kristen di Toraja dalam menentukan pilihan politik mereka.

“Kalau saya pribadi sih biasanya saya melihat dari pengalaman dan karirnya. Karena ee kalau kita lihat dari pengalaman dan karena itu bagus dan banyak otomatis dia akan banyak ee pengetahuan banyak kemampuan. Nah ketika memiliki banyak pengetahuan kemampuan bahkan kecerdasan dan kepintaran, maka dalam memimpin bangsa dan negara sudah pasti ee akan lebih mudah dan ketika menghadapi banyak masalah, terutama ya kita kan Indonesia banyak hutang pasti dia akan punya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Kak Anti, 2025)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki seorang kandidat, semakin luas pula pengetahuannya tentang pemerintahan dan kebijakan publik. Selain itu, pengalaman juga dinilai dapat membantu seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti masalah ekonomi dan utang negara. Dengan pengalaman yang memadai, seorang pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk mencari solusi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional. Sikap ini mencerminkan kesadaran politik yang semakin matang dan pragmatis, di mana mereka lebih fokus pada manfaat yang dapat diberikan oleh seorang pemimpin bagi seluruh rakyat.

Selain faktor pengalaman dan visi-misi kandidat, keputusan politik kaum muda Kristen di Toraja juga dapat dipengaruhi oleh aspek lain, seperti keberpihakan dan strategi yang diusung oleh partai politik. Mayoritas informan mengaku bahwa partai politik berpengaruh dalam keputusan mereka memilih pemimpin, dengan alasan utama bahwa partai turut menentukan arah

kebijakan dan pembangunan negara. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Ita bahwa:

“Tentunya sangat berpengaruh, karna itu partai juga ikut membentuk kebijakan publik serta ikut dalam menentukan arah pembangunan negara.” (Kak Ita, 2025)

Dari pernyataan ini di tekankan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan sering kali bergantung pada partai pengusung, sehingga memilih kandidat yang didukung partai dengan visi yang sesuai menjadi pertimbangan penting. Hal ini dikarenakan setiap partai memiliki visi dan misi yang memengaruhi kepemimpinan kandidat yang mereka usung, sehingga partai dapat menjadi indikator dalam menilai calon pemimpin juga. Hal ini sejalan dengan kutipan wawancara yang di lakukan bersama Kak Ririn yang mengatakan bahwa : “Iya dilihat dari partai pengusungnya, karena setiap partai politik itu kan punya misi punya visi juga begitu.” (Kak Ririn, 2025). Namun, di sisi lain, sebagian informan menyatakan bahwa partai politik bukan faktor utama dalam menentukan pilihan mereka. Jika dilihat dari hasil data wawancara beberapa informan merasa bahwa yang lebih penting adalah kapasitas dan rekam jejak kandidat, bukan dari partai mana mereka berasal. Mereka beranggapan bahwa meskipun partai politik berperan dalam mendukung dan mengusung kandidat, pada akhirnya kebijakan serta kepemimpinan tetap bergantung pada individu yang terpilih. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara bersama dengan Kak Sakti yang mengatakan bahwa :

“Saya secara pribadi itu tidak melihat partai siapa yang mendukung tapi saya melihat ke orangnya. karena ujung-ujungnya nanti yang akan melaksanakan amanat rakyat itu adalah mereka presiden.” (Kak Sakti, 2025)

Selain karena mereka melihat individu kandidat, alasan lain mengapa ada dari mereka yang tidak melihat partai politik yang mengusung kandidat presiden karena mereka tidak terlalu mengikuti dinamika partai politik atau tidak memiliki ketertarikan terhadap politik secara mendalam, sehingga mereka lebih fokus pada kualitas atau visi calon pemimpin. Dengan demikian Meskipun partai politik dianggap memiliki pengaruh tertentu, bagi banyak pemilih muda Kristen di Toraja, kredibilitas dan kapabilitas seorang pemimpin tetap menjadi aspek utama dalam menentukan pilihan mereka di pemilu presiden. Selain itu, faktor lain yang juga berperan dalam membentuk preferensi politik kaum muda Kristen di Toraja adalah media sosial. Dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa mayoritas menganggap media sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan mereka terhadap calon pemimpin. Hasil wawancara dengan informan salah satunya adalah Otniel, mengatakan bahwa :

“Media sosial sangat-sangat penting ini peran di era sekarang kalo Prabowo sering bilang era digitalisasi. Media merupakan hal-hal yang sangat penting dan sebetulnya media bisa berjalan dengan baik ketika orang sudah dibekali dengan kemampuan untuk memahami informasi. Jadi media informasi akan menjadi buruk dalam membentuk pandangan kita, ketika kita tidak bisa memahami isi bacaannya, tapi media menjadi hal

yang sangat penting ketika kita bisa memahaminya, kira kira seperti itu.” (Kak Otniel, 2025)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting di era digitalisasi, sebagaimana sering disinggung oleh Prabowo. Namun, efektivitas media dalam membentuk pandangan seseorang bergantung pada kemampuan individu dalam memahami informasi yang disajikan. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap isi bacaan, media sosial dapat menjadi alat yang justru membentuk pandangan yang keliru. Sebaliknya, jika individu mampu memahami informasi dengan baik, media sosial akan menjadi instrumen yang sangat berharga dalam membentuk opini dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu beberapa informan menekankan perlunya sikap kritis dalam menyaring informasi, mengingat banyaknya hoaks dan propaganda politik yang beredar. Hal ini dijelaskan oleh Kak Yorin yang mengatakan bahwa :

“Profil seseorang ya dari media ooo pemberitaan pemberitaan, ee pemberitaan kan semua yang diberitakan itu tidak 100% benar dan tidak 100% juga salah to. Seharusnya tidak boleh terpengaruh dengan ee pemberitaan-pemberitaan.” (Kak Yorin, 2025)

Pernyataan Kak Yorin menekankan bahwa seseorang seharusnya tidak langsung mempercayai setiap pemberitaan yang ada, melainkan perlu melakukan verifikasi dan analisis sebelum menerima atau menyebarkan informasi lebih lanjut. Dengan demikian, literasi media menjadi faktor kunci dalam memanfaatkan media sosial secara bijak. Sikap kritis terhadap informasi yang beredar membantu individu untuk tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan serta memungkinkan mereka membentuk opini yang lebih objektif dan berdasarkan fakta.

Berdasarkan hasil wawancara, media sosial yang paling banyak digunakan oleh kaum muda Kristen di Toraja dalam mengakses informasi mengenai politik sangat beragam. Platform yang paling sering disebutkan meliputi Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter (X), dengan beberapa juga menggunakan YouTube, WhatsApp, Threads, serta portal berita lokal seperti Kareba Toraja. Facebook menjadi salah satu platform yang cukup dominan, dengan alasan kemudahan akses dan banyaknya informasi yang tersedia. Namun, beberapa informan, seperti Kak Nori, menganggap Facebook terlalu "mencolok" karena sering terjadi perdebatan atau serangan antar pengguna maupun serangan antar pendukung yang satu dengan yang lainnya. “Kalau saya ee lebih ke Instagram karena kalau Facebook terlalu banyak ee mencolok kalau Facebook kayak saling menyerang ki.” (Kak Nori, 2025)

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kaum muda Kristen di Toraja mengandalkan berbagai media sosial untuk mengakses informasi politik, tetapi mereka juga memiliki kesadaran kritis terhadap bias dan kecenderungan masing-masing platform.

4. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun isu agama sering muncul dalam perbincangan politik, dan kaum muda Kristen di Toraja mengetahui hal tersebut, mereka lebih memprioritaskan faktor lain dalam menentukan pilihan politik mereka. Faktor-faktor tersebut seperti visi dan misi kandidat, pengalaman kerja, karakter ataupun konsistensi calon bukan berdasarkan latar belakang agama semata. Terdapat beberapa alasan mengapa isu agama tidak menjadi faktor utama dalam pemilu bagi kaum muda Kristen di Toraja. Salah satu faktor utamanya adalah budaya toleransi yang tinggi yang telah lama berkembang di daerah ini. Selain itu, kaum muda Kristen di Toraja memiliki kesadaran politik yang lebih rasional, di mana mereka menilai kandidat berdasarkan rekam jejak, program kerja, dan kebijakan yang ditawarkan. Mereka juga menolak eksploitasi politik identitas berbasis agama dan lebih memilih bersikap netral serta kritis terhadap wacana politik yang mengarah pada polarisasi berbasis agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaum muda Kristen di Toraja memiliki pendekatan politik yang lebih inklusif dan rasional dalam pemilu presiden, di mana faktor utama dalam memilih pemimpin adalah kompetensi dan kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kaum muda Kristen di Toraja merespons isu agama dalam pemilu dengan cara yang reflektif, damai, dan tidak konfrontatif. Mereka tidak melakukan aksi protes terbuka atau demonstrasi, melainkan lebih memilih berdiskusi dalam lingkup kecil. Diskusi ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami fenomena politik serta mempertajam sikap politik mereka secara rasional. Selain itu, mereka juga aktif menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan pendapat, meluruskan informasi yang berkembang, dan mengkritik politik identitas berbasis agama dengan cara yang lebih aman dan efektif. Selain berdiskusi dan berpartisipasi secara digital, sebagian kaum muda Kristen di Toraja juga memilih pendekatan spiritual dalam merespons isu agama dalam pemilu. Mereka meyakini bahwa doa adalah bentuk respons politik yang paling tepat, dengan harapan bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan pengajaran Iman Kristen yang selama ini mereka pahami yaitu Kasih. Selain itu, sikap ini juga dipengaruhi oleh status mereka sebagai kelompok minoritas di Indonesia, yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam menyikapi isu sensitif agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kaum muda Kristen di Toraja tidak menjadikan agama sebagai faktor utama dalam pemilu presiden melainkan salah satu isu yang mereka perhatikan adalah isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu contohnya adalah utang negara, dan pemberantasan korupsi. Mereka menginginkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dalam aspek ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keputusan politik mereka ini umumnya bersifat independen tanpa tekanan dari keluarga atau

lingkungan. Ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi mereka seperti partai politik dan media sosial yang turut memengaruhi keputusan mereka.

Referensi

- Darmawan, A. D. (2024). Persentase Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Menurut Kategori Kelompok (Data 2024). Databoks.
- Erma Ariyani, Rahmatun Nisa, & Susi Hardjati. (2024). Socialisation Of The Mobile Application For Online Population Registration And Civil Registration Services In Banjarmasin City. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(2), 137–146. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i2.1035>
- Fadhlurrahman, I. (2024). Persentase Penduduk Kabupaten Tana Toraja Menurut Jenjang Pendidikan (Juni 2024). Databoks.
- Koyong, J. H. (2016). Hubungan Identitas Sosial dengan Kematangan Beragama Pada Masyarakat Suku Toraja. *Psikoborneo*, 4(4), 576–585.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12. <https://doi.org/10.36312/jupe.v4i4.677>
- Manese, R. M. (2021). Relasi Agama Dan Politik: Preferensi Politik Pemilih Millenial Di Ponosakan Belang, Dalam Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2020. *Ri'ayah*, 6(2), 186–200.
- Parinduri, A., & Pujiati, P. (2023). Politik Identitas Agama sebagai Tantangan Pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 & Pilpres 2019. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 476–484. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7551>
- Ryan Aulia, G., & Syakirah Abu Nawas, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Umat Beragama pada Upacara Rambu Solo di Tana Toraja. *JURNAL USHULUDDIN*, 23(2), 1–16.
- Siddiq, M., & Salama, H. (2019). Etnografi Sebagai Teori Dan Metode. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 18(1), 23–48. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11471>
- Silitonga, N., & Tampomuri, H. R. (2024). Generasi Z dan Tantangan Etika Digital Dalam Pembelajaran Modern. *Jurnal Communitarian*, 6(1), 28. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74814>
- Simanjuntak, D. F., & Fernandes, R. (2022). Perilaku Pemilih Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 343–352. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.644>

- Triono, L. A. (2023, July 3). Pemilu 2024 Didominasi Pemilih Muda Usia 17-40 Tahun. Nu.or.Id.
- Warata, Y. U. (2024). Peranan Ir Soekarno Pada Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Yunus, F. M., Yasin, T. H., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9, 121-137. <https://doi.org/10.29103/jsds.v9i2.12590>